

DIPA FH-UNSRI

**LAPORAN PENELITIAN
HIBAH KOMPETITIF FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**



**PENGAWASAN PENINDAKAN INTERNAL
POLDA SUMSEL DAN KOMPOLNAS
TERHADAP PENYIDIK YANG MELAKUKAN PENYIMPANGAN DISKRESI**

Oleh:

**Vera Novianti, S.H., M.Hum. NIP. 197711032008012010
Artha Febriansyah SH., M.H., NIP. 198305092010121002
Hamonangan Albariansyah, SH., M.H, NIP. 198211252009121005**

**Dibiayai dari DIPA BLU Tahun 2014 FH UNSRI No.023-04.2.415112/2014 Tgl 5 Desember 2013
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
No 1245/UN9.1.2/PL-FH/2014 Tanggal 7 Juli 2014**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2014**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

1. Judul Penelitian : Pengawasan Penindakan Internal Polda Sumsel dan Kompolnas terhadap Penyidik yang Melakukan Penyimpangan Diskresi

2. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap

: Vera Novianti, SH., M.Hum

b. Jenis Kelamin

: Perempuan

c. NIP

: 197711032008012010

d. Pangkat/gol

: Penata Tk I/ IIIc

e. Fakultas/Bidang Kekhususan

: Hukum Unsri/ Hukum Pidana

f. Bidang Keahlian

: Hukum Pidana Anak

g. Alamat

: Jalan Sempayo No 54 Rt.01 Kelurahan Kemang Manis Palembang

h. Telp/Hp/Fax/E-mail

: 0711363462/ 081377537872/
novianti_vera@yahoo.com

i. Tim Peneliti

No	Nama	NIP/NIM	Bidang Keahlian	Fakultas/ Program Kekhususan
1	Artha Febriansyah SH.,M.H.	198305092010121002	Hukum Pidana	Hukum/Ilmu Hukum
2	Hamonangan Albariansyah SH., M.H.	198211252009121005	Hukum Pidana	Hukum/ Ilmu Hukum
3				
4				

3. Pendanaan dan jangka waktu penelitian

a. Jangka waktu penelitian yang diusulkan : 6 (enam) bulan

b. Biaya total yang diusulkan : Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah)

c. Biaya yang disetujui: Rp. 14.000.000,- (Empat Belas juta ribu rupiah)

Menyetujui,
Ketua Unit Penelitian FH-UNSRI

Putu Samawati, S.H.,M.H.
NIP. 19800308 2002122002

Inderalaya, Desember 2014

Ketua Peneliti

Vera Novianti, S.H. M.Hum
NIP. 197711032008012010

Mengetahui,
Dekan FH-UNSRI

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,L.LM.,Ph.D.
NIP. 19641202 199003 1 003

RINGKASAN

Kepolisian sebagai gerbang awal penyelidikan suatu perkara pidana dalam sistem peradilan pidana, sehingga polisi berkewajiban menyaring dan menginvestigasi perkara mana yang dapat diajukan atau tidak untuk diteruskan ketingkat penyidikan agar dapat diteruskan pada JPU dan pemeriksaan di persidangan. Dengan dimilikinya kekuasaan diskresi oleh penyidik polisi memiliki kekuasaan yang besar. Mengingat kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, maka diperlukan bentuk pengawasan dan penindakan yang tegas untuk mencegah dan menanggulangi penyimpangan diskresi dalam pelaksanaannya. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan mengingat diskresi oleh polisi didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif pada diri polisi sendiri.. Sesungguhnya fungsi penyelidikan ini merupakan filter terhadap peristiwa hokum tindak pidana yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut atau tidak diproses.

Kata kunci : Diskresi, penyidik, polisi, Pengawasan

PRAKATA

Puji syukur selalu kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul "Pengawasan Penindakan Internal Polda Sumsel dan Kompolnas terhadap Penyidik yang Melakukan Penyimpangan Diskresi" yang didanai oleh DIPA Fakultas Hukum UNSRI Tahun Anggaran 2014 ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Hukum UNSRI sebagai penyandang dana, sehingga penelitian penulis ini dapat dilakukan dan diselesaikan dengan baik disamping tugas pokok pendidikan dan pengajaran dan pengabdian pada masyarakat di civitas akademika.

Dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, tim penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini jauh dari sempurna, baik dari segi materi, maupun susunan kata dan kalimat. Harapan penulis semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu hukum khususnya bagi hukum pidana anak sendiri karena dengan adanya berbagai penelitian tentang pengawasan dan penindakan Polda Sumsel dan Kompolnas menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dan penegakan hukum oleh kepolisian khususnya tentang kebijakan yang diambil oleh pihak kepolisian dan segala aspek yang melingkupi tugas, fungsi dan kewenangannya maka kita akan mengetahui permasalahan dalam tugas kepolisian dalam praktek dan implementasinya.

Inderalaya, Desember 2014
Ketua Peneliti,

Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Pengesahan	ii
Ringkasan.....	iii
Prakata.....	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Bagan	viii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Urgensi Penelitian	6
Bab II Tinjauan Pustaka	8
A. Tinjauan Umum terhadap Kepolisian	8
B. Kewenangan sebagai Penyidik	9
C. Pengertian Diskresi	12
D. Kedudukan tentang Kepolisian dan Kopolnas dalam Perundangan	16
Bab III Tujuan dan Manfaat Penelitian	25
A. Tujuan Penelitian	25
B. Manfaat Penelitian	25
Bab IV Metode Penelitian	27
A. Tipe Penelitian.....	27
B. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	27
C. Tehnik Pengumpulan Bahan Penelitian	28
D. Lokasi Penelitiandan Sampel	29
E. Analisis data	29
Bab V Hasil dan Pembahasan	30
A. Pengaturan Kewenangan Diskresi oleh Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesi.....	30
B. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Penyidik Polisi Menerbitkan Diskresi dalam Penyidikannya	36
C. Bentuk Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan yang Dilakukan oleh Internal Polda Sumsel dan Kopolnas terhadap Penyidik yang Melakukan Penyimpangan Diskresi	42
Bab VI Kesimpulan dan Saran	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

Daftar Pustaka	54
Lampiran	57

Daftar Tabel

Tabel 1 **4**

Daftar Bagan

Bagan 1	44
Bagan 2	45
Bagan 3	50